



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

PENGUMUMAN

NOMOR : 42/SEK/PENG.KP1.1.7/XI/2024

TENTANG

**SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BAGI TENAGA NON ASN YANG AKTIF BEKERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, Mahkamah Agung membuka seleksi PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN

Penetapan Kebutuhan PPPK bagi tenaga non ASN yang aktif bekerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejumlah 1.030 (seribu tiga puluh) pegawai.

II. KEBUTUHAN PPPK

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, pengadaan PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung diperuntukkan bagi Tenaga Non ASN yang aktif bekerja dan honorariumnya dibayarkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung.

**III. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN
JABATAN PELAKSANA**

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|----------------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 ADMINISTRASI S-1 ADMINISTRASI NEGARA S-1 ADMINISTRASI NIAGA S-1 ADMINISTRASI PUBLIK S-1 AGRIBISNIS S-1 AGROTEKNOLOGI S-1 AKUNTANSI S-1 ANTROPOLOGI S-1 ARKEOLOGI S-1 BAHASA DAN SASTRA S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING S-1 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM S-1 BIOLOGI S-1 BUDIDAYA PERAIRAN S-1 BUDIDAYA PERTANIAN S-1 DAKWAH ISLAM S-1 DESAIN PRODUK S-1 EKONOMI S-1 FARMASI S-1 FILSAFAT S-1 FISIKA S-1 GEOFISIKA S-1 GEOGRAFI S-1 GEOLOGI | 104 |



| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|-------------------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | S-1 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL S-1 HUKUM S-1 ILMU AKTUARIA S-1 ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR S-1 ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN S-1 ILMU KOMPUTER S-1 ILMU PEMERINTAHAN S-1 ILMU PERPUSTAKAAN S-1 ILMU POLITIK S-1 ILMU SOSIAL S-1 KEHUTANAN S-1 KEPERAWATAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL S-1 KIMIA S-1 KOMPUTER S-1 KOMUNIKASI S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN S-1 MANAJEMEN S-1 MATEMATIKA S-1 NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN S-1 PENDIDIKAN S-1 PERIKANAN S-1 PERTANIAN S-1 PSIKOLOGI S-1 SEJARAH S-1 SISTEM INFORMASI S-1 SOSIOLOGI S-1 STATISTIKA S-1 SYARIAH S-1 TEKNIK S-1 TEKNIK ARSITEKTUR S-1 TEKNIK ELEKTRO S-1 TEKNIK FISIKA S-1 TEKNIK INDUSTRI S-1 TEKNIK INFORMATIKA S-1 TEKNIK KIMIA S-1 TEKNIK KOMPUTER S-1 TEKNIK LINGKUNGAN S-1 TEKNIK MESIN S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN S-1 TEKNIK SIPIL S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN S-1 TEKNOLOGI INFORMASI S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN S-1 USHULUDDIN TAFSIR HADITS | |
| 2 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III ADMINISTRASI D-III ADMINISTRASI BISNIS D-III ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN D-III ADMINISTRASI KEUANGAN D-III ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA D-III ADMINISTRASI NEGARA D-III ADMINISTRASI PERADILAN D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN D-III ADMINISTRASI TATA PERKANTORAN D-III AGRIBISNIS D-III AGRONOMI D-III AGROTEKNOLOGI D-III AKUNTANSI D-III APMD ILMU SOSIAL D-III APMD SOSIAL D-III BAHASA DAN SASTRA D-III BISNIS INTERNASIONAL D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL D-III EKONOMI D-III EKONOMI ADMINISTRASI KEUANGAN D-III EKONOMI AKUNTANSI D-III EKONOMI KEUANGAN D-III EKONOMI MANAJEMEN D-III EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI D-III EKONOMI MANAJEMEN KESEKRETARIATAN D-III EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN D-III EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBAND. D-III EKONOMI MANAJEMEN PERBENDAHARAAN D-III EKONOMI MANAJEMEN PERKANTORAN D-III ELEKTRONIKA D-III GIZI D-III HIPERKES | 46 |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---------------------|------------------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | D-III HUBUNGAN MASYARAKAT D-III HUKUM D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA D-III ILMU KEARSIPAN D-III INFORMATIKA D-III KEARSIPAN D-III KEBENDAHARAAN NEGARA D-III KEBIDANAN D-III KEPARIWISATAAN D-III KEPERAWATAN D-III KEPERAWATAN GIGI D-III KESEHATAN GIGI D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III KEUANGAN D-III KEUANGAN PERBANKAN D-III KOMPUTER D-III KOMPUTER AKUNTANSI D-III KOMPUTER INFORMATIKA D-III KOMPUTER PROGRAMMER D-III KOMPUTER TEKNIK D-III KOMUNIKASI D-III MANAJEMEN D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN D-III MANAJEMEN INFORMATIKA D-III PELAYARAN NIAGA D-III PENGELOLAAN HUTAN D-III PERPAJAKAN D-III REFRAKSI OPTISI D-III SEKRETARIS D-III SISTEM INFORMASI D-III SOSIAL POLITIK D-III TATA AIR PERTANIAN D-III TEKNIK D-III TEKNIK ELEKTRO D-III TEKNIK INDUSTRI D-III TEKNIK INFORMATIKA D-III TEKNIK KOMPUTER D-III TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN D-III TEKNIK MESIN D-III TEKNIK PERAWATAN MESIN D-III TEKNIK PERTAMBANGAN D-III TEKNIK RADIOTERAPI D-III TEKNIK SIPIL D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN D-III TEKNOLOGI INFORMASI D-III TEKNOLOGI PERIKANAN D-III TEKNOLOGI PERTANIAN D-III TELEKOMUNIKASI D-III USAHA PERJALANAN WISATA | |
| 3 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA | 680 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | SLTA | 140 |
| 5 | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | SEKOLAH DASAR | 60 |
| JUMLAH TOTAL | | | 1.030 |

IV. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNPN, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak sedang dalam pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin;
 6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana pada romawi III;
 9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 10. Bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 11. Berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) pelamar dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di Kartu Keluarga pelamar dimulai tanggal **30 November 2024** dan ditutup pada tanggal **31 Desember 2024**;
2. Setelah melakukan pendaftaran, pelamar masuk ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun yang telah didaftarkan dan memilih instansi Mahkamah Agung, jenis penetapan kebutuhan dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan daftar isian;
3. Dokumen Surat Lamaran, Surat Pernyataan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) wajib dibubuhkan *e-meterai* atau meterai konvensional;
4. Pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran setelah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran.

B. Dokumen Persyaratan Pelamar

Pelamar wajib mengunggah persyaratan *scan* dokumen asli dan berwarna (tidak hitam putih) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak dan terbaca dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung yang diketik menggunakan Komputer dan telah ditandatangani serta dibubuhi dengan *e-meterai* atau meterai konvensional sebagaimana tercantum pada lampiran I;
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
3. Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar dan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
4. Daftar Nilai atau Transkrip nilai asli dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan transkrip nilai serta surat hasil nilai konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
5. Surat pernyataan yang diketik dengan komputer dan telah ditandatangani serta dibubuhi dengan *e-meterai* atau meterai konvensional sebagaimana tercantum pada lampiran II;
6. Pas Foto terbaru menggunakan pakaian formal (kemeja putih dan berdasi) berlatar belakang merah;



7. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada lampiran III;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibubuhi dengan *e-meterai* atau meterai konvensional dan menerangkan bahwa PPNPN yang bersangkutan saat ini masih aktif bekerja, dan tidak sedang dalam pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin;serta honorariumnya dibayarkan melalui DIPA Mahkamah Agung sebagaimana tercantum pada lampiran IV **yang disertai dengan evaluasi kinerja tahunan sampai bulan November 2024** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi PPNPN pada satuan kerja pusat ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja, dan;
 - b. Bagi PPNPN pada satuan kerja pengadilan ditandatangani oleh atasan langsung dan diketahui oleh kuasa pengguna anggaran serta ketua/wakil ketua pengadilan.

VI. TAHAPAN SELEKSI

- A. Seleksi Administrasi; dan
- B. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.

VII. KETENTUAN KELULUSAN

- A. Seleksi Administrasi
 1. Kelulusan seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dan dokumen persyaratan yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 2. Apabila data yang diisi dan dokumen yang diunggah tidak sesuai/tidak terbaca/tidak jelas maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan dinyatakan gugur;
 3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang dipergunakan untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- B. Seleksi Kompetensi
Pelamar dinyatakan lulus seleksi berdasarkan peringkat terbaik pada masing-masing penetapan kebutuhan.

VIII. MASA SANGGAH

Masa Sanggah merupakan waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil akhir masing-masing tahapan seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. waktu yang diberikan untuk mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir masing-masing tahapan seleksi diumumkan;
2. panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
3. pengumuman ulang hasil akhir masing-masing tahapan seleksi diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah dan bersifat mutlak.

IX. JADWAL SELEKSI

Mengacu Surat Plt. Kepala BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

| No. | Kegiatan | Jadwal |
|-----|--------------------|------------------|
| 1. | Pengumuman Seleksi | 29 November 2024 |



| No. | Kegiatan | Jadwal |
|-----|---|--|
| 2. | Pendaftaran Seleksi | 30 November s.d. 31 Desember 2024 |
| 3. | Seleksi Administrasi | 16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025 |
| 4. | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 4 s.d. 18 Februari 2025 |
| 5. | Masa Sanggah | 19 s.d. 21 Februari 2025 |
| 6. | Jawab Sanggah | 20 s.d. 27 Februari 2025 |
| 7. | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 22 s.d. 28 Februari 2025 |
| 8. | Penarikan data final | 1 s.d. 7 Maret 2025 |
| 9. | Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi | 8 s.d. 23 Maret 2025 |
| 10. | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 24 Maret s.d. 8 April 2025 |
| 11. | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi | 9 s.d. 16 April 2025 |
| 12. | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 17 April s.d. 16 Mei 2025 |
| 13. | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 22 April s.d. 21 Mei 2025 |
| 14. | Pengumuman Hasil Kelulusan | 22 s.d. 31 Mei 2025 |
| 15. | Pengisian DRH NI PPPK | 1 s.d. 30 Juni 2025 |
| 16. | Usul Penetapan NI PPPK | 1 s.d. 31 Juli 2025 |

Catatan:

- Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui laman <https://mahkamahagung.go.id>, dan <https://sscASN.bkn.go.id>.
- Jadwal dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.
- Peserta wajib memantau informasi jadwal di *website* tersebut.

X. LAIN-LAIN

- Pelamar wajib membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
- Hal-hal yang perlu diperhatikan:
 - Pelamar dianggap **gugur** dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan apabila melamar:
 - lebih dari 1 jenis pengadaan dan/atau 1 jenis jabatan; atau
 - menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda.
 - Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan pegawai ASN. Apabila pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
 - Dalam hal Pelamar sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
- Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 instansi dan 1 penetapan kebutuhan jabatan;
- Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan



barang/sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Mahkamah Agung, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;

- E. Bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi, maka dinyatakan gugur;
- F. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani ternyata tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar yang bersangkutan;
- G. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil kelulusan setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional;
- H. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- I. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia;
- J. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
- K. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman <https://mahkamahagung.go.id>, <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id>, dan <https://sscasn.bkn.go.id>;
- L. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK bagi Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi *helpdesk* melalui:
 - 1. *e-mail* : rekrutmen.casn@mahkamahagung.go.id;
 - 2. *WhatsApp* : +62 822-1101-1667 pada hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
 - 3. *X* : @CASN_MA_RI;
 - 4. *TikTok* : @humasmahkamahagung;
 - 5. *Instagram* : rekrutmencasn.mahkamahagung;
- M. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK bagi Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui *Whistleblowing System* Mahkamah Agung, pada laman <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.
- N. Seluruh pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK bagi Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 29 November 2024
Sekretaris Mahkamah Agung
Selaku
Ketua Panitia Seleksi,



Sugiyanto

